



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.244, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Indikator
Kinerja Utama. Penetapan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan TNI.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI.**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan/pedoman ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara 2010-2014.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan oleh setiap pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran : I
Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor : 04 Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Pertahanan.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan lembaga lain yang terkait.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase penyelesaian tugas kajian dan tugas khusus pimpinan secara akuntabel dan tepat waktu.	Membantu penyelesaian tugas kajian dan tugas khusus pimpinan.	1. Dokumen kajian yang dihasilkan 2. Agenda surat/penomoran
2.	Persentase satuan kerja UO Kemhan yang memiliki pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan terjamin.	Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan UO Kemhan.	1. Kebijakan pegawai 2. Laporan kegiatan Ropeg
3.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program serta pelaporan program kerja dan anggaran UO Kemhan jangka pendek dan sedang yang up to date, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan	1. Dokumen perencanaan 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi
4.	Persentase pelayanan tugas pimpinan dan tata usaha Kementerian yang sinergis, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur penyelesaian administrasi dan pelayanan tugas pimpinan Kementerian	1. Agenda surat/penomoran 2. Agenda pimpinan

1	2	3	4
5.	Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang pengamanan, kerumahainggaan dan poliklinik, perbekalan dan fasilitas bangunan.	Mengukur efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor.	1. SOP penggunaan sarana dan prasarana kantor. 2. Laporan kegiatan Roun.
6.	Persentase pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan UO Kemhan berdasarkan data yang up to date, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur efisiensi penggunaan keuangan UO Kemhan.	Laporan pertanggungjawaban keuangan.
7.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Itjen.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja Renstra 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
8.	Persentase Satker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP di bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan.	Mengukur kinerja organisasi di bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan.	Laporan hasil pemeriksaan.
9.	Persentase Satker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP di bidang keuangan.	Mengukur kinerja organisasi di bidang keuangan.	Laporan hasil pemeriksaan.
10.	Persentase Satker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP di bidang pengadaan.	Mengukur kinerja organisasi di bidang pengadaan.	Laporan hasil pemeriksaan.
11.	Persentase Satker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP di bidang logistik.	Mengukur kinerja organisasi di bidang logistik.	Laporan hasil pemeriksaan.
12.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Strahan.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja, Renstra 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
13.	Persentase prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global secara tepat waktu dengan data yang up to date dan akurat.	Mengukur ketepatan dalam memprediksi ancaman.	Dokumen perkembangan lingkungan strategis dan prediksi ancaman.

1	2	3	4
14.	Persentase kelengkapan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional maupun global secara terintegrasi	Mengukur kesiapan pengerahan komponen pertahanan.	Kebijakan pengerahan komponen pertahanan.
15.	Persentase wilayah pertahanan yang memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel dan up to date	Terwujudnya tata ruang dan kejelasan batas wilayah.	1. RUTR Wilas. 2. Data Wilas.
16.	Persentase kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	Mengukur efektivitas kebijakan di bidang pertahanan.	1. Kebijakan Pertahanan Negara. 2. Dokumen Strategis.
17.	Persentase kelengkapan peraturan perundang-undangan/legislasi bidang Pertahanan Negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	Mengukur manfaat peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan.	Peraturan perundang-undangan yang terkait.
18.	Persentase keberhasilan pencapaian kopentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional.	Mengukur kemampuan tingkat persahabatan di forum internasional.	1. Dokumen kerjasama dengan negara lain. 2. Laporan kegiatan Ditkorsin.
19.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Renhan.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja, Renstra. 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
20.	Persentase perencanaan pembangunan pertahanan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyusunan dokumen perencanaan sesuai prioritas dan strategi pertahanan negara.	1. Bujuk penyusunan dokumen perencanaan. 2. Dokumen Renja, Renstra dan RJP Hanreg. 3. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
21.	Persentase hasil perencanaan program dan anggaran tahunan Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyelesaian perencanaan program dan anggaran tahunan.	Dokumen RKA K/L.

1	2	3	4
22.	Persentase administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyelesaian administrasi pelaksanaan anggaran.	Dokumen SKOM.
23.	Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang terpenuhi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilannya.	Mengukur ketepatan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran	1. Laporan evaluasi pelaksanaan program. 2. Laporan daya serap anggaran.
24.	Jumlah rekomendasi Litbang dan rekomendasi peningkatan kinerja yang mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan IPTEK.	Mengukur efektivitas kebijakan Litbang dan peningkatan kinerja organisasi.	Kebijakan Litbang.
25.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Polhans.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja, Renstra 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
26.	Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai kemajuan IPTEK yang dikembangkan secara mandiri.	Mengukur potensi teknologi dan industri untuk mendukung Hanneg.	Kebijakan pengelolaan Industri dalam negeri.
27.	Persentase terbentuknya komponen cadangan sesuai posur pertahanan secara akuntabel.	Menyiapkan komponen cadangan sesuai posur.	1. Kebijakan komponen cadangan. 2. RUU komponen cadangan. 3. Data komponen cadangan.
28.	Jumlah komponen pendukung yang dipetakan dan dibina secara terintegrasi dengan data yang up to date, akurat dan siap digunakan.	Menyiapkan komponen pendukung guna mendukung Hanneg.	1. Kebijakan komponen pendukung. 2. RUU komponen pendukung. 3. Data komponen pendukung.
29.	Indeks penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat.	Menyiapkan peran serta masyarakat dalam mendukung Hanneg.	1. Kebijakan Bela Negara. 2. Data SDM untuk Hanneg.
30.	Persentase komunikasi sosial, pelayanan serta pendataan dan dokumentasi tentang veteran RI yang akuntabel dan tepat waktu.	Menyiapkan veteran RI sebagai wujud peran serta dalam Hanneg.	1. Kebijakan veteran. 2. Data veteran.

1	2	3	4
31.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Kuantan.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja, Renstra. 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
32.	Persentase kelengkapan kebijakan dan standar mutu pendidikan pertahanan negara.	Mengukur standar mutu pendidikan pertahanan negara.	1. Kebijakan pendidikan Haneg. 2. Laporan kegiatan Ditpendidikan
33.	Persentase kelengkapan kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem kekuatan komponen utama di bidang personel dengan pemetaan yang up to date dan akurat.	Mengukur sistem kekuatan komponen utama di bidang personel.	1. Kebijakan bidang personel. 2. Laporan kegiatan Ditpersonel.
34.	Persentase kelengkapan kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem kekuatan komponen utama di bidang materiil dengan pemetaan yang up to date dan akurat.	Mengukur sistem kekuatan komponen utama di bidang materiil.	Kebijakan bidang materiil.
35.	Persentase kelengkapan kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang up to date dan akurat.	Mengukur sistem pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa.	Kebijakan bidang fasilitas jasa.
36.	Persentase kelengkapan kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang kesehatan dengan pemetaan yang up to date dan akurat.	Mengukur sistem pertahanan negara di bidang kesehatan.	Kebijakan bidang kesehatan.
37.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Balitbang.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja, Renstra. 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
38.	Persentase provinsi yang memiliki pemetaan dan rekomendasi terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global.	Pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global.	Peta potensi ancaman.

1	2	3	4
39.	Jumlah rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan IPTEK serta mampu dijadikan prototipe.	Mengukur inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan.	Rekomendasi inovasi teknologi.
40.	Jumlah model dan/atau prototype alat peralatan, pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri.	Mengukur model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara.	Model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan.
41.	Jumlah rekomendasi sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan IPTEK.	Mengukur sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan.	Dokumen rekomendasi sumber daya pertahanan.
42.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Badiklat	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja, Renstra. 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
43.	Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya dan mampu menjawab tantangan tugas di bidang manajemen pertahanan	Meningkatkan kinerja di bidang manajemen pertahanan.	Laporan pelaksanaan pendidikan.
44.	Persentase lulusan yang meningkat kemampuan dan keterampilan berbahasa.	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbahasa.	Laporan pelaksanaan pendidikan
45.	Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya dan mampu menjawab tantangan tugas di bidang teknis fungsional pertahanan.	Meningkatkan kinerja di bidang teknis fungsional pertahanan.	Laporan pelaksanaan pendidikan
46.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Badan Sarana Pertahanan.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja, Renstra. 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
47.	Persentase pengadaan Alutsista dan peralatan pendukung Alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel.	Memenuhi kebutuhan alutsista, peralatan pendukung alutsista dan alat kesehatan.	Laporan hasil pengadaan.

1	2	3	4
48.	Persentase pembangunan konstruksi dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan secara terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel.	Memenuhi kebutuhan konstruksi untuk pembangunan kekuatan pertahanan.	Laporan pembangunan konstruksi.
49.	Persentase sarana prasarana pertahanan yang memenuhi standar mutu.	Memenuhi kebutuhan sarana prasarana pertahanan sesuai standar mutu.	Laporan pembangunan sarana prasarana pertahanan
50.	Jumlah kode NSN yang terintegrasi secara nasional dan internasional dengan dokumentasi yang akuntabel.	Memberikan kode NSN yang terintegrasi.	Laporan kode NSN.
51.	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara Kemhan/TNI yang up to date, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Pendataan Barang Milik Negara yang up to date, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Laporan pengelolaan Barang Milik Negara.
52.	Persentase pengelolaan administrasi PNS Kemhan secara terintegrasi dan akuntabel.	Mewujudkan administrasi PNS Kemhan secara terintegrasi dan akuntabel.	Administrasi pengurusan PNS.
53.	Persentase pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan berdasarkan data yang up to date, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan.	Laporan keuangan Kemhan dan TNI.
54.	Persentase satuan kerja yang menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.	Mengukur penerapan TI dalam sistem informasi pertahanan negara.	Laporan penerapan TI.
55.	Terbentuknya mitra positif Kemhan/TNI di forum nasional dan internasional.	Mengukur kinerja organisasi dalam memperkenalkan berbagai program yang di laksanakan oleh Kemhan.	Jumlah kliping/berita yang terbit dan tersiar.
56.	Persentase pelayanan bantuan hukum yang akuntabel.	Mengukur kinerja organisasi dalam memberikan saran/pendapat hukum dan/atau membantu penyelesaian hukum di lingkungan Kemhan.	Laporan penyelesaian hukum di lingkungan Kemhan.

1	2	3	4
57.	Persentase penyandang cacat personel pertahanan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri serta jenis layanan perumahsakitkan yang memenuhi standar mutu dengan administrasi yang akuntabel dan tepat waktu.	Peningkatan pelayanan rehabilitasi bagi penyandang cacat.	Laporan kegiatan Pusrhabilitasi.

MENTERI PERTAHANAN,

PURNOMO YUSGANTORO

Lampiran II
Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor : 04 Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

1. Nama Unit Organisasi : Mabes TNI
2. Tugas : Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

3. Fungsi :
 - a. Penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan negara, kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa.
 - b. Penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan negara, kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa.
 - c. Pemulihan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Persentase penyelesaian tugas kajian dan tugas khusus pimpinan secara akurat, tepat waktu dan tepat waktu.	Mengukur penyelesaian tugas kajian dan tugas khusus pimpinan	1. Dokumen kajian yang dihasilkan 2. Agenda surat/pernomoran
2	Persentase Saker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akurat sesuai SOP	Mengukur kinerja organisasi sesuai SOP	Laporan hasil pemeriksaan Itjen TNI.
3	Persentase perencanaan pelaksanaan, pengendalian serta boparan program kerja dan anggaran U.O Mabes TNI dan TNI yang up to date, akurat terintegrasi akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan	1. Dokumen perencanaan 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi
4	Persentase koakurasi dan kelengkapan deteksi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional dan global secara tepat waktu	Tersedianya informasi yang akurat dan lengkap dalam rangka deteksi dini.	1. Laporan Intelijen. 2. Agenda surat/pernomoran

1	2	3	4
5.	Persentase kesiapsiagaan dan keberhasilan operasi militer secara terintegrasi, akurat, tepat waktu.	Mengukur kesiapan penyelenggaraan operasi, perjalanan wilayah perbatasan dan kesiapan peta operasi.	1. TOP/DSPP 2. Laporan pelaksanaan operasi dan penjagaan wilayah. 3. Laporan hasil pemetaan.
6.	Persentase kesiapan personel baik kemampuan dan kekuatan dalam rangka penggunaan kekuatan sesuai standar secara terintegrasi dan akurat.	Mengukur kesiapan personel meliputi kemampuan dan kekuatan dalam rangka penggunaan kekuatan TNI.	1. TOP/DSPP 2. Laporan kegiatan Spers TNI
7.	Persentase kesiapan logistik dalam rangka penggunaan kekuatan TNI secara tepat jumlah, waktu, sasaran, jenis dan mutu.	Mengukur kesiapan logistik dalam rangka penggunaan kekuatan TNI.	1. TOP/DSPP 2. Laporan kegiatan Slog TNI.
8.	Persentase wilayah yang memiliki daya tangkal handal dalam menghadapi setiap ancaman secara terintegrasi.	Mengukur kesiapan wilayah pertahanan yang memiliki daya tangkal handal.	1. RUTR pertahanan. 2. Data SDA/WB.
9.	Persentase kelancaran informasi dalam rangka penggunaan kekuatan dengan sarana komunikasi elektronika, pernaka dan teknologi informasi yang handal, terintegrasi, aman dan akurat.	Tersedianya sarana komunikasi guna mendukung kelancaran informasi dalam rangka penggunaan kekuatan.	1. TOP/DSPP 2. Laporan kegiatan Skomlek TNI.
10.	Persentase produk Intelstrat yang mendeteksi seluruh ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional maupun global secara akurat dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian berbagai produk Intelstrat.	1. Laporan Intelijen. 2. Agenda surat/pemomoran.
11.	Persentase Taruna lulusan pendidikan pertama kemiliteran integratif yang memenuhi standar mutu.	Mengukur kualitas lulusan pendidikan pertama kemiliteran.	Laporan pelaksanaan pendidikan.
12.	Persentase lulusan SESCO TNI yang meningkatkan kinerjanya serta jumlah modul latihan gabungan TNI yang mampu menjawab tantangan tugas TNI secara profesional.	Mengukur kualitas lulusan SESCO TNI dan modul latihan gabungan TNI yang mampu menjawab tantangan tugas TNI.	Laporan pelaksanaan pendidikan.
13.	Persentase keleabatan informasi terkait TNI di masyarakat dan keakuratan informasi bagi prajurit terkait konjungsi pimpinan.	Mengukur kemampuan organisasi dalam memperkenalkan berbagai program yang dilaksanakan oleh TNI.	Jumlah kliping/berita yang terbit dan terlaris.

1	2	3	4
14.	Persentase keamanan VIP di ring I dan protokol khusus kenegaraan dengan standar tertinggi.	Terwujudnya keamanan VIP di ring I dan protokol kenegaraan.	Laporan kegiatan Haspampres.
15.	Persentase prajurit TNI yang memiliki kondisi mental sesuai standar.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mempersiapkan mental prajurit TNI.	Laporan kegiatan Pusbintal TNI.
16.	Persentase kelengkapan dokumen dan koleksi benda bersejarah serta kelengkapan penyajian sejarah secara akuntabel dan sesuai fakta.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyediakan kelengkapan dokumen, tradisi TNI, koleksi dan penyajian benda bersejarah.	Laporan pelaksanaan kegiatan Pusjarah TNI.
17.	Persentase kesiapan personel dan fasilitas kesehatan dalam rangka penggunaan kekuatan secara terintegrasi akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyiapkan personel dan fasilitas kesehatan dalam rangka penggunaan kekuatan.	Laporan kegiatan Puskes TNI.
18.	Persentase kelengkapan peraturan perundang undangan berkaitan TNI beserta penegakan dan pelayanannya yang akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penegakan dan pelayanan serta menyiapkan kelengkapan peraturan perundang undangan.	Laporan kegiatan Rabinikum TNI.
19.	Persentase pembekalan barang/materiil dalam rangka penggunaan kekuatan secara tepat jumlah, waktu, sasaran, jenis dan mutu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelenggaraan pembekalan barang/materiil dalam rangka penggunaan kekuatan.	Laporan kegiatan bidang pembekalan barang/materiil.
20.	Persentase pengelolaan keuangan di UO MABES TNI dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan di UO MABES TNI dan TNI.	Laporan keuangan UO Mabes TNI dan TNI.
21.	Persentase penyelenggaraan fungsi keganisiran dan soliditas TNI yang akuntabel dan tepat waktu di wilayahnya.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelenggaraan fungsi keganisiran dan soliditas TNI.	Laporan kegiatan Gernisur.
22.	Persentase Saker yang terintegrasi dalam sistem informasi yang handal dengan data yang up to date dan akurat di lingkungan UO MABES TNI dan TNI.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan UO MABES TNI dan TNI.	Laporan kegiatan Infoharta TNI.

1	2	3	4
23.	Persentase kesiapan dan keberhasilan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian sesuai standar UN.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyiapkan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian	Laporan kegiatan PMPP TNI
24.	Jumlah kajian dan rekomendasi di bidang militer yang mampu memenuhi kebutuhan TNI.	Mengukur kemampuan organisasi dalam merumuskan kajian strategis militer.	1 Rumusan kajian strategis militer. 2 Laporan kegiatan Pusjantara TNI.
25.	Persentase kesiapan personel dan sarana komunikasi elektronik, pernika dan teknologi informasi dalam rangka penggunaan kekuatan secara handal terintegrasi, aman dan akurat.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyiapkan personel, sarana komunikasi elektronik, pernika dan teknologi informasi.	Laporan kegiatan Saikorniek TNI.
26.	Persentase kesiapan fasilitas komando pengendalian operasi militer dengan teknologi informasi yang terintegrasi, up to date dan akurat sepanjang waktu.	Mengukur kemampuan organisasi menyiapkan fasilitas komando pengendalian operasi militer dengan teknologi informasi yang terintegrasi.	Laporan kegiatan Pusdatops TNI.
27.	Persentase pelayanan tugas pimpinan di bidang administrasi umum, bagian khusus dan kearsipan yang akurat, akuratabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam pelayanan tugas pimpinan bidang administrasi umum, khusus dan kearsipan	Laporan kegiatan Setum TNI.
28.	Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang urusan dalam, personel dan logistik di lingkungan Mabes TNI	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan prima bidang urusan dalam, personel dan logistik.	Laporan kegiatan Denma Mabes TNI.
29.	Persentase wilayah udara yurisdiksi nasional yang bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan	Mengukur kemampuan organisasi yang bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.	Laporan kegiatan Kohanudnas
30.	Persentase pembinaan lulusan pendidikan integratif TNI sesuai standar mutu dan peringkat latihan integratif, latihan bersama dan latihan kesiapsiagaan operasional yang akuratabel	Mengukur kemampuan organisasi dalam pembinaan pendidikan integratif TNI, latihan gabungan TNI latihan bersama dan latihan kesiapsiagaan operasional	Laporan kegiatan Kocklat TNI

1	2	3	4
31.	Pemeriksaan kesiapan dan kesiambatan TNI dalam misi pemertahanan perdamaian sesuai standar UN	Mengukur kesiapan dan keberhasilan tugas pemertahanan perdamaian dunia	Laporan penugasan.
32.	Pemeriksaan sakti yang terintegrasi dalam sistem informasi yang handal dengan data yang up to date dan akurat di lingkungan UO MABES TNI dan TNI.	Mengukur sistem informasi sakti yang terintegrasi di lingkungan UO MABES TNI dan TNI.	Laporan sistem informasi UO MABES TNI dan TNI

MENTERI PERTAHANAN,

PURNOMO YUSGANTORO

Lampiran . III
 Peraturan Menteri Penahanan
 Nomor : 04 Tahun 2010
 Tanggal 31 Maret 2010

1. Nama Unit Organisasi : TNI Angkatan Darat.
2. Tugas : Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat serta pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
3. Fungsi
 - a. Menyelenggarakan pertempuran, pembinaan kekuatan dan pembinaan teritorial
 - b. Menyelenggarakan pembinaan intelijen, operasi, personel, Logistik teritorial perencanaan serta pengawasan dan pemeriksaan.
 - c. Menyelenggarakan pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan
 - d. Menyelenggarakan fungsi bagi seluruh kecakapan TNI AD (Infanteri, Kavaleri, Artileri Medan, Artileri Pertahanan Udara, Penerbangan, Zeni, Perhubungan, Peralatan Perbekalan dan Angkatan Kesehatan, Polisi Militer, Ajudan Jenderal, Topografi, Hukum dan Keuangan)
 - e. Menyelenggarakan operasi khusus yang bersifat strategis dan taktis untuk menyenggarakan operasi khusus yang bersifat taktis
 - f. Menyelenggarakan pembinaan jasmani militer, pembinaan mental, psikologi, perencanaan dan pengembangan, sejarah, sistem informasi dan penerangan.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan matra darat baik nasional, regional maupun global secara tepat waktu.	Tersedianya informasi yang akurat dan lengkap dalam rangka deteksi dini	1. Laporan Intelijen. 2. Agenda surat/peromoran
2.	Persentase produk intelijen yang akurat, tepat guna dan tepat waktu dalam mendeteksi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan matra darat	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian produk intelijen	1. Laporan Intelijen. 2. Agenda surat/peromoran

1	2	3	4
3.	Persentase kesiapan operasional dan keberhasilan operasi satuan Kostrad secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kesiapan operasional dan keberhasilan operasi satuan Kostrad	Laporan kegiatan Kostrad
4.	Persentase kesiapan operasional dan keberhasilan operasi khusus secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam kesediaan operasional dan keberhasilan operasi khusus.	Laporan kegiatan Kopassus.
5.	Persentase wilayah darat yang memiliki informasi geografis dan peta topografi yang akurat, up to date dan lengkap.	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan informasi geografis dan peta topografi wilayah darat.	Laporan kegiatan Topografi.
6.	Persentase kesiapan dan keberhasilan operasi darat mandiri maupun gabungan secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam pelaksanaan operasi darat mandiri, gabungan dan bersama.	1 TO-2/DSPP. 2 Laporan kegiatan Sopsad
7.	Persentase wilayah darat yang memiliki daya tangkal handal dalam menghadapi setiap ancaman.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mempersiapkan wilayah darat sehingga memiliki daya tangkal.	1 RUTR pertahanan. 2 Data SDA/B
8.	Persentase satuan TNI AD yang memiliki kemampuan Binter dengan didukung piranti lunak sesuai kebutuhan.	Mengukur kinerja organisasi sehingga satuan TNI AD memiliki kemampuan Binter.	Laporan kegiatan Pusterad.
9.	Persentase kesiapan dan keberhasilan pertahanan wilayah darat secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mempersiapkan pertahanan wilayah darat.	Laporan kegiatan Kodam.
10.	Persentase penyelesaian perkara hukum dan peradilan TNI AD yang akuntabel.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian perkara dan pelayanan hukum.	Laporan kegiatan Ditkumad
11.	Persentase perencanaan, pengendalian dan pelaporan program kerja dan anggaran TNI AD yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan	1 Dokumen perencanaan. 2 Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
12.	Persentase Saiker TNI AD yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi akuntabel sesuai standar	Mengukur kinerja organisasi sesuai SOP	Laporan hasil pemeriksaan tijen.

1	2	3	4
13.	Persentase pelayanan tugas pimpinan TNI AD di bidang administrasi umum, bagian khusus, kearsipan dan dokumentasi yang akurat dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam pelayanan tugas pimpinan bidang administrasi umum, khusus dan kearsipan.	1. Laporan kegiatan Setumad 2. Agenda surat.
14.	Persentase pengelolaan keuangan TNI AD yang akurat dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan TNI AD.	Laporan keuangan TNI AD.
15.	Persentase kelengkapan dokumen dan koleksi benda bersejarah serta kelengkapan penyaliran sejarah TNI AD secara akurat dan obyektif.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyediakan kelengkapan dokumen, koleksi dan penyaliran benda bersejarah.	Laporan pelaksanaan kegiatan Disjarahad
16.	Jumlah aplikasi sistem informasi TNI AD yang diimplementasikan secara terintegrasi dengan data yang up to date dan akurat.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelenggaraan aplikasi sistem informasi TNI AD yang terintegrasi.	Laporan kegiatan Disinfolahad.
17.	Persentase kesiapan personel TNI AD baik kemampuan maupun kekuatan dalam rangka Birkuat sesuai standar secara akurat.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyiapkan personel TNI AD dalam rangka Birkuat.	TOP/DSPP
18.	Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang urusan dalam, personel dan logistik di lingkungan Mabes AD.	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan prima bidang urusan dalam, personel dan logistik.	Laporan kegiatan Denma Mabes AD
19.	Persentase pelaksanaan personel TNI AD yang diorosis sesuai ketentuan serta persentase pengawalan VIP/VIP di wilayah.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian pelanggaran personel dan pengawalan VIP/VIP.	Laporan kegiatan Puspomad.
20.	Persentase kesiapan kesehatan personel dan dukungan kesehatan TNI AD beserta pengelolaan secara akurat dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mempersiapkan personel, dukungan dan pengelolaan kesehatan.	Laporan kegiatan Dirkesad.
21.	Persentase pelayanan dan pengelolaan RSPAD yang memenuhi standar mutu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan RSPAD	Laporan kegiatan RSPAD

1	2	3	4
22.	Persentase keberhasilan administrasi personel, administrasi umum dan pemenuhan hak moral personel TNI AD yang akurat, tepat waktu dan sesuai standar.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian administrasi personel, administrasi umum dan pemenuhan hak moral personel TNI AD.	Laporan kegiatan Dilajenad.
23.	Persentase kesiapan jasmani prajurit TNI AD yang sesuai standar.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mempersiapkan jasmani prajurit TNI AD sesuai standar.	Laporan kegiatan Disjasad.
24.	Persentase personel TNI AD yang memiliki kondisi mental sesuai standar.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mempersiapkan mental prajurit TNI AD sesuai standar.	Laporan kegiatan Disbintalad.
25.	Persentase kesepati kondisi psikologis prajurit dan satuan TNI AD sesuai standar.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mempersiapkan psikologis prajurit dan satuan TNI AD sesuai standar.	Laporan kegiatan Dispsiad.
26.	Persentase lulusan Akmil yang tanggap, tanggon dan trengginas dengan pengelolaan pendidikan yang memenuhi standar.	Mengukur kualitas lulusan Akmil yang tanggap, tanggon dan trengginas sesuai standar.	Laporan pelaksanaan pendidikan.
27.	Persentase lulusan Seskoad dengan pengelolaan pendidikan yang memenuhi standar serta jumlah hasil kajian yang mampu menjawab kebutuhan TNI AD.	Mengukur kualitas lulusan Seskoad yang memenuhi standar dan kajian yang mampu menjawab kebutuhan TNI AD.	Laporan pelaksanaan pendidikan.
28.	Persentase lulusan SECAPA AD dengan pengelolaan pendidikan yang memenuhi standar.	Mengukur kualitas lulusan Secapa AD sesuai standar.	Laporan pelaksanaan pendidikan.
29.	Persentase kesiapan dan keselarasan doktrin, pendidikan dan latihan TNI AD yang mampu menjawab kebutuhan.	Mengukur kesiapan dan keselarasan doktrin, pendidikan dan latihan.	Laporan kegiatan Kodiklat TNI AD.

1	2	3	4
30.	Persentase satuan Infanteri yang memiliki kemampuan teknis sesuai standar.	Mempersiapkan satuan Infanteri agar memiliki kemampuan teknis sesuai standar.	Laporan kegiatan Pusserif
31.	Persentase satuan Kavaleri yang memiliki kemampuan teknis sesuai standar.	Mempersiapkan satuan Kavaleri agar memiliki kemampuan teknis sesuai standar	Laporan kegiatan Puspenkav
32.	Persentase satuan Armed yang memiliki kemampuan teknis sesuai standar.	Mempersiapkan satuan Armed agar memiliki kemampuan teknis sesuai standar.	Laporan kegiatan Pusseharmed
33.	Persentase satuan Arhanud yang memiliki kemampuan teknis sesuai standar.	Mempersiapkan satuan Arhanud agar memiliki kemampuan teknis sesuai standar	Laporan kegiatan Pusseharanud
34.	Persentase kesiapan dan keberhasilan bantuan tempur dan bantuan administrasi Zeni secara akurat, tepat waktu	Mengukur kesiapan bantuan tempur dan bantuan administrasi Zeni	Laporan kegiatan Dilziad.
35.	Persentase kesiapan dan keberhasilan bantuan tempur dan bantuan administrasi Perhubungan secara akurat, tepat waktu.	Mempersiapkan keberhasilan bantuan tempur dan bantuan administrasi Perhubungan	Laporan kegiatan Dithubad.
36.	Persentase kesiapan logistik TNI AD secara akurat, tepat waktu.	Mengukur kesiapan logistik TNI AD.	Laporan kegiatan Slogad
37.	Persentase kesiapan materiil peralatan TNI AD beserta pengelolannya secara akurat, tepat waktu.	Mengukur kesiapan beserta pengelolaan materiil peralatan TNI AD	Laporan kegiatan Ditpalad.
38.	Persentase kesiapan bekal dan jasa Bekang TNI AD beserta pengelolannya secara akurat, tepat waktu.	Mengukur kesiapan beserta pengelolaan bekal dan jasa Bekang TNI AD	Laporan kegiatan Ditbekang
39.	Persentase kesiapan dan keberhasilan bantuan tempur terbatas dan pelayanan udara TNI AD	Mengukur kesiapan dan keberhasilan bantuan tempur terbatas dan pelayanan udara TNI AD	Laporan kegiatan Pusporobad
40.	Persentase kesiapan fasilitas K4I (Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi) yang terintegrasi dan akurat sepanjang waktu	Mengukur kesiapan fasilitas K4I (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi dan Informasi)	Laporan kegiatan Puskodad.

1	2	3	4
41	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan serta persentase akurasi penilaian kelaikan materiil TNI AD yang sesuai standar.	Mengukur kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta persentase akurasi penilaian kelaikan materiil TNI AD.	Laporan kegiatan D'sitbangad
42	Persentase keakuratan dan kecepatan informasi, publikasi dan dokumentasi TNI AD.	Meningkatkan keakuratan dan kecepatan informasi, pub-kasi dan dokumentasi TNI AD.	Jumlah kiping/berita yang terbit dan tersiar.

MENTERI PERTAHANAN,

PURNOMO YUSGANTORO

Lampiran : IV
 Peraturan Menteri Pertahanan
 Nomor : 04 Tahun 2010
 Tanggal : 31 Maret 2010

1. Nama Unit Organisasi : TNI Angkatan Laut
2. Tugas :
 - a. Melaksanakan Tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
 - b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
 - c. Melaksanakan Tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
 - e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut
3. Fungsi :
 - a. Pembinaan Kemampuan TNI Angkatan Laut:
 - 1) Memelihara dan meningkatkan kemampuan intelijen maritim melalui pemantapan organisasi peningkatan kemampuan personel dan pemenuhan kebutuhan materiil yang terintegrasi antara satuan dan/atau matra.
 - 2) Memelihara dan meningkatkan kemampuan pertahanan dengan meningkatkan profesionalisme keparajitan agar memiliki daya tempur yang tinggi melalui latihan-latihan secara terus menerus dan berlanjut dalam berbagai tingkatan.
 - 3) Memelihara dan meningkatkan kemampuan keamanan dengan melakukan pembinaan satuan secara intensif, terus menerus dan berlanjut agar mempunyai mobilitas tinggi untuk menghadapi setiap kemungkinan konflik bersenjata di daerah rawan, ancaman terorisme, gangguan keamanan dan pelanggaran hukum diseluruh perairan yurisdiksi nasional, pelanggaran wilayah perbatasan laut serta penanganan obyek nasional yang bersifat strategis dan menjadi tanggung jawab TNI/TNI Angkatan Laut
 - 4) Memelihara dan meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan Negara di laut dengan melakukan detoks dan cegah dini terhadap berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membantu pemerintah dalam membina wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

- 5) Meningkatkan kemampuan dukungan meliputi diplomasi militer, personel, penguasaan teknologi, penelitian dan pengembangan, manajemen, K4I, perencanaan, komunikasi dan elektronika, angkatan, pengawasan dan pemeriksaan, survey dan pemetaan, pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kepada Polri dan Pemda, SAR dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.
- b. Pembinaan Kekuatan TNI Angkatan Laut.
 - 1) Menyempurnakan doktrin TNI Angkatan Laut, buku petunjuk, sistem dan metode sebagai landasan operasional.
 - 2) Melaksanakan penataan organisasi dan pengembangan struktur serta gelar kekuatan TNI Angkatan Laut, terutama melengkapi pos pengaman wilayah perbatasan dan pulau terluar serta daerah rawar konflik.
 - 3) Menata kekuatan personel guna memenuhi kebutuhan DSP menuju postur TNI Angkatan Laut yang diharapkan.
 - 4) Memenuhi kebutuhan bekal sesuai dengan norma bekal pokok yang harus ada di satuan dan gudang persediaan untuk menunjang pencapaian profesionalisme serta kelancaran latihan dan operasi.
 - 5) Memelihara, menambah dan memodernisasi Alutsista dan peralatan lainnya secara bertahap, dengan memperhatikan.
 - 6) Kemampuan anggaran Pemerintah.
 - 7) Memprioritaskan produk industri dalam negeri guna mengurangi ketergantungan dari luar negeri.
 - 8) Mengutamakan pengadaan peralatan yang terintegrasi, antar mata guna memungkinkan interoperability dalam latihan dan operasi gabungan TNI.
 - 9) Peningkatan kerjasama industri militer dengan negara sahabat.
 - 10) Memelihara dan meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan dalam berbagai tingkatan.
 - 11) Mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Laut yang mampu memberikan daya tarikan terhadap ancaman potensial dan dalam keadaan krisis mampu segera bertindak serta menanggulangi semua ancaman faktual yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
 - 12) Meningkatkan kesiapan TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur dan aturan belian yang berlaku.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Persentase koordinasi dan kelengkapan deteksi dan analisis ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan secara akuntabel dan tepat waktu.	Tersedianya informasi yang akurat dan lengkap dalam rangka deteksi dini.	1. Laporan Intelijen. 2. Agenda surat/pemomoran
2	Persentase produk intelijen TNI AL yang akuntabel dan tepat waktu dalam mendeteksi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyediaan produk intelijen.	1. Laporan Intelijen. 2. Agenda surat/pemomoran
3	Persentase kesiapan operasional dan keberhasilan operasi Korps Marinir secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kesiapan operasional dan keberhasilan operasi Korps Marinir.	Laporan kegiatan Korps Marinir.
4	Persentase kesiapan dan keberhasilan operasi TNI AL mandiri, gabungan dan bersama secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam pelaksanaan operasi TNI AL mandiri, gabungan dan bersama.	1. TOP/DSPP. 2. Laporan kegiatan Sospat
5	Persentase kesiapan dan kelengkapan data serta fasilitas K3I (Komando, Kendali, Komunikasi) TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kesiapan dan kelengkapan fasilitas K4I (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi dan Informasi).	Laporan kegiatan PusKodal
6	Persentase kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyediaan data dan informasi Hidro oseanografi.	Laporan kegiatan Dishidros.
7	Persentase potensi maritim yang dipetakan dan diberdayakan sesuai kepentingan untuk mendukung operasi TNI AL	Mengukur kinerja organisasi dalam pemberdayaan dan pembinaan wilayah pertahanan negara Matri Laut.	Dokumen potensi maritim
8	Persentase kesiapan dan keberhasilan Pusat Penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kesiapan dan keberhasilan Pusat Penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi.	Laporan kegiatan Puspenberbat.

1	2	3	4
9.	Persentase perencanaan dan pengendalian operasi dan latihan TNI AL secara akurat dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam perencanaan dan pengendalian operasi dan latihan TNI AL.	Dokumen operasi dan latihan TNI AL
10.	Persentase wilayah laut yurisdiksi nasional yang bebas pelanggaran hukum dan gangguan keamanan serta persentase kesiapsiagaan operasi laut.	Mengukur kesiapsiagaan operasi laut dalam penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.	Data pelaksanaan operasi
11.	Persentase pembinaan hukum dan dukungan hukum yang akurat.	Mengukur kinerja pencapaian pembinaan hukum dan dukungan hukum TNI AL.	Dokumen penyelesaian kasus hukum.
12.	Persentase Saker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akurat sesuai SOP.	Mengukur kinerja organisasi sesuai SOP	Laporan hasil pemeriksaan It'en AL.
13.	Persentase perencanaan, pengendalian serta pelaporan program kerja dan anggaran TNI AL yang terintegrasi, akurat dan tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan.	1. Dokumen perencanaan. 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
14.	Persentase pengelolaan administrasi umum yang akurat dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam Pengadministrasian umum TNI AL	1. Laporan kegiatan Setumal. 2. Agenda surat/penomoran.
15.	Persentase penyelesaian tugas kajian dan tugas khusus pimpinan secara akurat dan tepat waktu.	Mengukur penyelesaian tugas kajian dan tugas khusus pimpinan.	1. Dokumen kajian yang dihasilkan. 2. Agenda surat/penomoran.
16.	Persentase pencapaian standar pelayanan prima di bidang kemarkasan di lingkungan Mabesal.	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan prima bidang kemarkasan di lingkungan Mabesal.	Laporan kegiatan Dorma Mabesal.
17.	Persentase pengelolaan keuangan TNI AL secara akurat dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan TNI AL.	Laporan keuangan TNI AL.
18.	Jumlah aplikasi sistem informasi pertahanan negara matra laut dan metodologi evaluasi yang diimplementasikan secara terintegrasi dengan data yang up-to-date dan akurat.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelenggaraan aplikasi sistem informasi matra laut dan metodologi evaluasi yang terintegrasi.	Laporan kegiatan Disinfolahtal.

1	2	3	4
19.	Persentase kesiapan personel baik kemampuan maupun kekuatan sesuai standar dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan personel baik kemampuan maupun kekuatan.	Dokumen DSP
20.	Persentase satker yang memperoleh alokasi SDM sesuai kualifikasi dan kebutuhan dengan administrasi personel yang akurat dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AL sesuai kualifikasi.	Dokumen penempatan personel
21.	Persentase pemenuhan hak-hak personel dan keluarga, kesiapan fisik dan mental yang akurat dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam pemenuhan hak-hak perawatan personel TNI AL.	Laporan kegiatan Dswalbersal.
22.	Persentase personel TNI AL beserta keluarganya yang mendapatkan dukungan dan pelayanan kesehatan secara bermutu dan akurat.	Mengukur pencapaian pemenuhan hak pelayanan kesehatan personel TNI AL beserta keluarganya.	Data dukungan, pelayanan dan fasilitas kesehatan
23.	Persentase kesiapan kondisi psikologis prajurit dan satuan TNI AL sesuai standar serta keberhasilan operasi psikologis TNI AL.	Mengukur pencapaian kesiapan kondisi psikologis prajurit TNI AL.	Data psikologi personel dan satuan TNI AL.
24.	Persentase pelanggaran personel TNI AL yang diproses sesuai ketentuan serta persentase dukungan pelayanan polisi militer yang akurat dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer TNI AL.	Data laporan kasus pelanggaran baik disiplin maupun hukum.
25.	Persentase program peserta didik, kurikulum dan mutu pendidikan TNI AL yang sesuai standar dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan TNI AL.	Dokumen produk dan kurikulum
26.	Persentase hasil didik Kobangdiklat yang memenuhi standar dan jumlah kajian taktis yang mampu menjawab kebutuhan TNI AL.	Mengukur hasil didik Kobangdiklat yang memenuhi standar dan jumlah kajian taktis yang dihasilkan.	Dokumen laporan pendidikan
27.	Persentase hasil didik AAL yang memenuhi standar	Mengukur kualitas lulusan AAL yang memenuhi standar	Dokumen laporan pendidikan.

1	2	3	4
28.	Persentase hasil didik Seskoal yang memenuhi standar dan jumlah kajian strategik yang mampu menjawab kebutuhan TNI AL.	Mengukur kualitas lulusan Seskoal yang memenuhi standar dan jumlah kajian yang mampu menjawab kebutuhan.	Dokumen laporan pendidikan.
29.	Persentase kesiapan logistik TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan logistik TNI AL.	Laporan kegiatan Siogat.
30.	Persentase kesiapan sarana prasarana komunikasi, persandian dan pemuka komunikasi TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan sarana prasarana komunikasi, persandian dan pemuka komunikasi TNI AL.	Dokumen komunikasi, persandian dan pemuka komunikasi TNI AL.
31.	Persentase kesiapan platform KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan platform KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL.	Dokumen platform KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL.
32.	Persentase kesiapan peralatan senjata, elektronika dan amunisi TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan peralatan senjata, elektronika dan amunisi TNI AL.	Dokumen peralatan senjata, elektronika dan amunisi TNI AL.
33.	Persentase kesiapan peralatan fungsional fasilitas dan sarana prasarana pangkalan TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan peralatan fungsional fasilitas dan sarana prasarana pangkalan TNI AL.	Laporan kegiatan Disfasanal.
34.	Persentase material TNI AL yang diuji kelakuan secara akurat sesuai standar.	Mengukur kinerja organisasi dalam pengujian kelaikan material TNI AL.	Dokumen kelaikan material TNI AL.
35.	Jumlah kajian dan produk Litbang TNI AL yang sesuai kebutuhan dan standar.	Mengukur kinerja organisasi dalam pengkajian dan produk Litbang TNI AL.	Dokumen hasil kajian dan produk Litbang TNI AL.
36.	Persentase penambahan material Alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut.	Dokumen pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut.
37.	Persentase kesiapan dukungan bekal dan pengelolaan Simak BMN TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam menyampaikan dukungan perbekalan dan pengelolaan Simak BMN TNI AL.	Dokumen administrasi perbekalan dan dukungan bekal.

1	2	3	4
38.	Persentase kesiapan dan keberhasilan operasi angkutan laut militer yang akurat dan tepat waktu.	Mengukur kesiapan dan keberhasilan operasi angkutan laut militer	Dokumen operasi angkutan laut militer
39.	Persentase koakurasi dan kecepatan informasi publikasi dokumentasi dan sejarah TNI AL secara akurat.	Mengukur kinerja organisasi dalam peningkatan Perpas dan Perunt IN AL	Jumlah kipingiberta yang terbit dan tersar

MENTERI PERTAHANAN,

PURNOMO YUSGANTORO

Lampiran : V
 Peraturan Menteri Pertahanan
 Nomor : 04 Tahun 2010
 Tanggal : 31 Maret 2010

1. Nama Unit Organisasi : TNI Angkatan Udara
2. Tugas :
 - a. Melaksanakan tugas TNI mata udara di bidang pertahanan.
 - b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan kelentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
 - c. Melaksanakan tugas TNI dalam membangun dan mengembangkan kekuatan mata udara
 - d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.
3. Fungsi :
 - a. Pembinaan
 - 1) Pembinaan Kekuatan organisasi personel, material fasilitas dan jasa, sistem dan metode serta anggaran dalam rangka melaksanakan tugas TNI Angkatan Udara
 - 2) Pembinaan Kemampuan untuk mewujudkan suatu kemampuan operasional berbasis profesionalitas yang dapat diandalkan guna mencapai keberhasilan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Penggunaan Kekuatan.
 - 1) Penangkal. Kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa
 - 2) Penindak. Mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - 3) Pemulihan. Bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang pemberontakan, konflik komuna' hulu-hara, terorisme dan bencana alam.
4. Indikator Kinerja Utama

4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase keakuratan dan kelengkapan deteksi dan analisis terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan matrik udara baik nasional, regional maupun global secara tepat waktu.	Tersedianya informasi yang akurat dan lengkap dalam rangka deteksi dini.	1. Laporan Intelijen. 2. Agenda surat/penomoran.
2.	Persentase produk intelijen yang akurat dan tepat waktu dalam pengamanan tubuh AU, intelijen udara, penelitian personel, persandian dan komunikasi khusus.	Penyelesaian produk intelijen yang akurat dan tepat, meliputi : pengamanan tubuh AU, intelijen udara, penelitian personel, persandian dan komunikasi khusus.	1. Laporan Intelijen. 2. Agenda surat/penomoran.
3.	Persentase keakuratan dan kelengkapan pemetaan dan pemotretan udara dalam operasi dan latihan.	Pemotretan udara yang akurat dan lengkap.	Dokumen pemetaan.
4.	Persentase kesiapan dan keberhasilan operasi udara mandiri maupun gabungan secara akurat, tabel dan tepat waktu.	Kesiapan dan keberhasilan operasi udara mandiri dan gabungan.	1. TOP/DSPP. 2. Laporan kegiatan Sopsau.
5.	Persentase kesiapsiagaan dan kelancaran operasi udara di wilayahnya	Kesiapsiagaan dan kelancaran operasi udara di wilayah Indonesia.	Laporan kegiatan Koopsau I & II
6.	Persentase wilayah udara yurisdiksi nasional yang bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.	Udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.	Laporan kegiatan Kohanudnas
7.	Persentase keakuratan dan kelengkapan dukungan operasi udara	Dukungan operasi udara akurat dan lengkap.	Laporan kegiatan Disbangopsau.
8.	Persentase tingkat kelancaran serta keselamatan terbang dan kerja TNI AU	Lingkat kelancaran, keselamatan terbang dan kerja TNI AU terjamin	Laporan kegiatan Disbangjau.

1	2	3	4
9.	Persentase potensi dirgantara yang dipetakan dalam mendukung operasi TNI AU	Potensi dirgantara terpetakan dalam rangka mendukung operasi TNI AU.	Dokumen potensi dirgantara nasional.
10.	Persentase pelanggaran personel TNI AU yang dikenakan sanksi sesuai ketentuan serta persentase keamanan fasilitas TNI AU.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian pelanggaran personel dan pengamanan fasilitas TNI AU.	Laporan kegiatan Puspomau
11.	Persentase penyelesaian perkara hukum dan pelayanan hukum TNI AU.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian perkara dan pelayanan bantuan hukum	Dokumen penyelesaian kasus hukum
12.	Persentase satker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP.	Mengukur kinerja organisasi sesuai SOP	Laporan hasil pemeriksaan tjen.
13.	Persentase perencanaan, pengendalian serta pelaporan program kerja dan anggaran TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan.	1. Dokumen perencanaan. 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
14.	Persentase administrasi umum yang akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam pelayanan administrasi umum.	1. Laporan kegiatan Selumau. 2. Agenda surat
15.	Persentase pengelolaan keuangan TNI AU yang akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan TNI AU	Laporan keuangan TNI AU
16.	Persentase kesiapan dan kelengkapan data K3I (komando, kendali, komunikasi dan informasi) TNI AU.	Mengukur kesiapan dan kelengkapan data K3I TNI AU.	Laporan kegiatan Puskomalau.
17.	Persentase penyelesaian tugas kajian dan tugas knsus pimpinan secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur penyelesaian tugas kajian dan tugas khusus pimpinan	1. Dokumen kajian yang dihasilkan. 2. Agenda surat/pemoran.
18.	Jumlah aplikasi sistem informasi TNI AU yang diimplementasikan secara terintegrasi dengan data yang up-to date dan akuntabel.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelenggaraan aplikasi sistem informasi TNI AU yang terintegrasi.	Laporan kegiatan Disinfoaltau.

1	2	3	4
19.	Persentase kesiapan personel TNI AU baik kemampuan dan kekuatan dalam rangka binkuat sesuai standar secara akuntabel.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyiapkan personel TNI AU dalam rangka Binkuat.	TOP/DSPP
20.	Persentase administrasi personel TNI AU secara akuntabel.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan administrasi personel.	Dokumen penempatan personel
21.	Persentase personel TNI AU yang terpenuhi hak – haknya secara tepat waktu dan memiliki sikap mental sesuai standar	Mengukur kemampuan organisasi dalam pelayanan terhadap kesejahteraan prajurit.	Dokumen pembayaran hak-hak personel
22.	Persentase kesiapan kesehatan personel dan dukungan kesehatan TNI AU dalam rangka binkuat secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mempersiapkan personel, dukungan kesehatan dalam rangka Binkuat.	Laporan kegiatan Diskesau.
23.	Persentase kesiapan kesehatan awak pesawat TNI & petugas khusus matra udara secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kesiapan kesehatan awak pesawat TNI AU.	Laporan kegiatan Lakespra
24.	Persentase kesiapan kondisi psikologi personel TNI AU secara akuntabel	Mengukur kesiapan psikologi personel TNI AU.	Laporan psikologi Dpspsau.
25.	Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang urusan dalam, personel dan logistik Mabes AU.	Mengukur kemampuan organisasi dalam membocikan pelayanan prima bidang urusan dalam, personel, dan logistik.	Laporan kegiatan Denma Mabes AU
26.	Persentase kurikulum, alins/alongin dan metodologi yang up to date dan mampu menjawab kebutuhan TNI AU.	Mengukur kesiapan kurikulum, alins/ alongins dan metode yang mampu menjawab kebutuhan	Data materi, alins/alongins, revisi kurikulum pendidikan.
27.	Persentase lulusan SESKO AU yang sesuai standar serta jumlah kajian matra udara yang mampu menjawab kebutuhan	Mengukur kualitas lulusan Seskoau yang memenuhi standar dan kajian yang mampu menjawab kebutuhan.	Dokumen laporan pendidikan.

1	2	3	4
28.	Persentase lulusan AAU yang trisakti viratama secara tepat waktu.	Mengukur kualitas lulusan AAU yang memenuhi standar.	Dokumen laporan pendidikan.
29.	Persentase lulusan KODIK AU yang memenuhi standar mutu.	Mengukur kualitas lulusan Kodik AU yang memenuhi standar.	Dokumen laporan pendidikan
30.	Persentase kesiapan peralatan komunikasi dan alat bantu navigasi, radar darat, radar ke udara, simulasi pesawat terbang elektronik khusus serta pernika TNI AU secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan alat komunikasi dan alat bantu navigasi, radar darat, radar ke udara, simulasi pesawat terbang, elektronik khusus serta pernika TNI AU.	Laporan kegiatan Diskomleka.
31.	Persentase kesiapan logistik TNI AU secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan logistik TNI AU.	Laporan kegiatan Slogau.
32.	Persentase pengadaan barang dan jasa terpusat TNI AU dalam rangka binkuat secara akuntabel dan tepat waktu.	Memenuhi kebutuhan barang dan jasa TNI AU dalam rangka Binkuat.	1. Dokumen pengadaan. 2. Laporan kegiatan Disadaau.
33.	Persentase pengelolaan inventori materiil, bekal umum, ranmor dan sarana BMP TNI AU secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur efisiensi pengelolaan inventori materiil, bekal umum, ranmor dan sarana prasarana BMP.	Daftar inventaris materiil TNI AU.
34.	Persentase kesiapan fasilitas instalasi, konstruksi dan barang tidak bergerak TNI AU beserta pengelolaan inventornya secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kesiapan fasilitas instalasi, konstruksi dan barang tidak bergerak TNI AU.	Daftar inventaris fasilitas dan instalasi yang terstandarisasi
35.	Persentase kesiapan pesawat terbang, senjata udara/ darat dan amunisi serta sarana bantuan TNI AU secara akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur kesiapan pesawat, senjata dan munisi TNI AU.	Data kesiapan pesawat, senjata dan munisi TNI AU.
36.	Persentase hasil pemeliharaan tingkat berat alutsista dan non alutsista serta produksi materiil yang akuntabel dan tepat waktu	Mengukur pelaksanaan pemeliharaan alat dan non alat serta produksi materiil TNI AU.	Dokumen pemeliharaan Alutsista dan Nonalutsista TNI AU.

1	2	3	4
37.	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan materi alutsista TNI AU yang sesuai kebutuhan.	Mengukur kualitas litbang materi alutsista TNI AU.	Dokumen hasil penelitian
38.	Persentase koordinasi dan kecepatan informasi, dokumentasi, produksi dan sebaran mitra udara.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menginformasikan berbagai kegiatan di TNI AU.	Jumlah kliping/berita yang terbit dan tersiar.

MENTERI PERTAHANAN,

PURNOMO YUSGANTORO